



# Ada Temuan BPK 2,44 Miliar

## ◆ Senduk: Sudah 1,78 Miliar yang Dikembalikan

EDITOR : CHANLY MUMU (UKW 17401)  
PELIPUT : FRANKY SUMARAW

**BITUNG**—Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Meski begitu, ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang harus ditindaklanjuti Pemkot Bitung.

Meski mendapat opini WTP terungkap jika BPK Perwakilan Sulut mendapati sekira Rp2,44 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Ada sekitar Rp2 miliar lebih yang direkomendasikan BPK untuk dikembalikan ke kas daerah. Temuan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan proyek dan lainnya yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Bitung. Tak hanya itu, ada temuan administrasi yang juga harus diselesaikan sesuai ketentuan," beber sumber yang meminta namanya disimpan rapat, Selasa (28/6).

Sementara itu, Inspektur Kota Bitung Yoke Senduk SH MSi ketika dikonfirmasi, membenarkan jika dari LKPD tahun anggaran 2021 ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Bitung baik itu finansial dan non finansial.

"Finansial tersebut sebesar Rp2,44 miliar. Dari jumlah itu sudah dikembalikan ke kas daerah untuk posisi saat ini sudah Rp1,78 miliar. Sedangkan administrasi atau non finansial kalau dinominalkan senilai Rp2,44 miliar, yang artinya setelah ditindaklanjuti administrasinya, nilai tersebut



Yoke Senduk

hilang atau sudah selesai," urai Senduk.

Dikatakannya, nilai yang harus dikembalikan ke kas daerah tersebut didominasi kekurangan volume pekerjaan di beberapa SKPD. Dan sesuai perintah undang-undang, penyelesaian rekomendasi BPK tersebut selambat-lambatnya 60 hari, terhitung sejak menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima.

"Hal ini berlaku sama di pemerintah daerah, dan untuk Pemkot Bitung, setelah menerima LHP langsung dibentuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota Bitung," jelas Senduk. Sehingga lanjutnya, catatan rekomendasi dari BPK tersebut sementara ditindaklanjuti lewat evaluasi dan

monitoring sehingga dipas-tikan dari batas waktu yang ditentukan semuanya sudah rampung. "Segera mungkin kami tindaklanjuti, sehingga sebelum batas waktu yang ditentukan, semuanya sudah rampung," tambah Senduk.

Ia kemudian mendorong semua yang terkait dengan tindaklanjuti rekomendasi dari BPK tersebut. Pihaknya juga melalui tim terus melakukan evaluasi dan monitoring, sehingga sebelum batas waktu yang ditentukan catatan-catatan tersebut sudah rampung.

Lanjutnya, dari evaluasi pembukaan tindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan kerugian negara maupun kerugian daerah, Kota Bitung berada di peringkat kelima dari 16 pemerintah daerah yang terdiri dari Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota di Sulut yang telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ya dalam kegiatan yang baru saja dilaksanakan, Kota Bitung berada di peringkat kelima dari 16 pemerintah daerah di Sulut," pungkasnya. (tr-01/can)